

AL-FALAH

Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan

Pendidikan Agama Anak pada Lingkungan Keluarga Petani
Karet di Desa Batu Ampar Kecamatan Cempaka
Kota Banjarbaru
Taufiqurrahman & Syaifuddin

Pendidikan Islam Masa Orde Lama (Refleksi Historis
tentang Dinamika, Kebijakan, dan Tokoh)
Syaiful Bahri Jamarah

Metode Pendidikan Akidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah
Darul Ilmi Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru
Yuni Hartati & Fauzan

Krisis Spiritual Masyarakat Modern
Anshori Mahmud

Pendidikan Akhlak di Kalangan Generasi Muda
Hasbullah Bakry

Manusia Kera
Muhammad Toriqularif

Talak Via SMS dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-
Undang Perkawinan Indonesia
Wardian

Model Bimbingan Belajar Orang Tua terhadap Siswa
Berprestasi di SDN Batu Ampar RT. 28 RW. 09
Kelurahan Cempaka Banjarbaru
Saftoni & M. Ramli

العقل والقلب في القرآن
(دراسة سيكولوجية في بعض الآيات القرآنية)
Falsal Mubarak Seff



Diterbitkan Oleh :
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
(STAI) AL-FALAH
BANJARBARU**

PENDIDIKAN ISLAM MASA ORDE LAMA

(Refleksi Historis tentang Dinamika, Kebijakan, dan Tokoh)

Oleh: Syaiful Bahri Djamarah*

Abstrak

Secara historis, Orde Lama berkuasa setelah Indonesia merebut kemerdekaannya dari tangan penjajah pada tahun 1945. Ketika itu, Soekarnolah yang dinobatkan sebagai Presiden Pertama RI. Wakilnya Muhammad Hatta. Rentang kekuasaannya sejak 1945 hingga 1966. Selama berkuasa, ada keberpihakan kebijakan orde lama untuk menjadikan pendidikan, terutama pendidikan Islam, sebagai prioritas utama untuk dilaksanakan. Pendidikan Islam dipandang sebagai pengendali realitas sosial dan sebagai sarana transformasi budaya, arena mengasah dan mempertajam akal, dan mengembangkan intelektualitas. Kebijakan politik pendidikan orde lama terhadap pendidikan Islam cukup beralasan, karena tulang punggung lahirnya kemerdekaan Indonesia adalah karena keterlibatan tokoh-tokoh politik Islam, baik yang berjuang lewat pendidikan maupun yang menggunakan kekuatan lainnya memberikan pengaruh yang kuat ketika itu.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Orde Lama, Kebijakan dan Tokoh

*Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin.

A. Pendahuluan

Alur sejarah sebuah dinamika adalah suatu keniscayaan. Di dalam sejarah pasti ada dinamika dalam siklus waktu dan sejarah peradaban yang sangat panjang. Di dalam dinamika sejarah itulah pena sejarah telah mencatat bahwa ada pendidikan Islam di pentas kehidupan, yang merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya dalam ikut serta mengangkat harkat dan martabat manusia dari keterpurukan intelektual.

Yang tidak terbantahkan adalah bahwa sejarah pendidikan Islam di Indonesia berbanding lurus dengan pertumbuhan dan perkembangan umat Islam di bumi pertiwi ini. Abad ke-7 telah diyakini adalah awal masuknya Islam masuk ke Indonesia. Ketika Islam berkembang dengan pesat pada abad VIII M yang ditandai dengan munculnya sejumlah kerajaan Islam, pendidikan Islam pun berkembang mengikuti irama dan dinamika perkembangan Islam. Pendek kata, di mana pun ada komunitas kaum muslimin, di sana ada aktifitas pendidikan Islam yang dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah tempat mereka berada.

Eksistensi pendidikan Islam di Indonesia adalah fakta sejarah yang telah ada sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda dan penduduk Jepang, pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat sendiri dengan mendirikan pesantren, sekolah dan tempat latihan-latihan lain. Setelah merdeka, pendidikan Islam dengan ciri khasnya madrasah dan pesantren mulai mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah Republik di Indonesia.

Pemerintahan pada masa orde lama yang berkuasa dalam rentang waktu 1945 sampai dengan 1966, telah diberi tugas oleh UUD 1945 untuk mengusahakan agar terbentuknya suatu sistem pendidikan dan pengajaran yang bersifat nasional. Oleh karena itu, pastilah sejarah mencatat

bagaimana pemerintah orde lama memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap perkembangan pendidikan Islam. Pemerintahan memandang bahwa agama mempunyai kedudukan dan peranan sangat penting dan strategis. Peran utama agama sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam pembangunan nasional, agama juga berpengaruh untuk membersihkan jiwa manusia dan kemakmuran rakyat, Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami dan diamalkan oleh setiap individu, warga dan masyarakat hingga akhirnya dapat menjiwai kehidupan bangsa dan negara.

Secara khusus pendidikan Islam dan bertanggung jawab atas kelangsungan tradisi ke Islam dalam arti yang seharusnya. Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan tentang pendidikan dapat dilihat bahwa posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional meliputi: pendidikan Islam seperti mata pelajaran, pendidikan Islam sebagai lembaga, pendidikan Islam sebagai nilai. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran adalah diberikan mata pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Kedudukan mata pelajaran ini semakin kuat dari satu fase ke fase yang lain.¹

Sejalan dengan dinamika dan pasang surut sejarah umat Islam di Indonesia, sejarah pendidikan pun mengalami dinamika dan pasang surut pula. Bagaimana sesungguhnya perjalanan sejarah pendidikan Islam tersebut pada masa Orde Lama adalah persoalan yang cukup menarik untuk dibahas dan diketahui. Agar pembahasan ini mempunyai arah yang jelas, maka pembahasan dalam makalah ini mencoba merefleksikan secara historis tentang dinamika perkembangan, kebijakan yang dikeluarkan, dan tokoh-

¹<http://www.armhando.com/2012/02/kebijakan-pemerintah-dalam-pendidikan.html>

tokoh pendidikan yang peduli dan konsisten memperjuangkan pendidikan Islam pada masa Orde Lama. Pembahasan dimulai dengan memotret pandangan sang penguasa Orde Lama.

B. Pembahasan

1. Pendidikan Islam di Mata Soekarno

Ketika pembahasan pendidikan Islam ini ditujukan kepada bagaimana sesungguhnya pendidikan Islam dalam pandangan Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia di masa Orde Lama, penulis teringat dengan Syamsul Kurniawan, penulis buku *Pendidikan di Mata Soekarno* yang berisi tentang modernisasi pendidikan Islam dalam pemikiran Soekarno. Antara Soekarno dan Islam memang tidak bisa dipisahkan pada masa pemerintahannya. Oleh karena itu, sangat wajar Soekarno sangat memperhatikan pendidikan Islam yang notabene memang diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ketika itu. Apalagi mengingat keberhasilan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah sebagian besar hasil dari jerih payah, perjuangan, dan pengorbanan tokoh-tokoh umat Islam yang belakangan banyak yang diberi gelar pahlawan. Oleh karena itu, baik ketika mengawali tulisan ini maupun ketika mengakhiri bagaimana pendidikan Islam dalam pandangan Soekarno, semuanya dikutip secara random dari buku tersebut.²

Menurut Soekarno pendidikan Islam mempunyai kepentingan dan tanggung jawab mengendalikan realitas sosial karena ia dapat dipakai sebagai sarana transformasi bagi masyarakat Muslim. Bagi Soekarno, pendidikan Islam, sebagaimana pendidikan pada umumnya, merupakan arena untuk mengasah akal, mempertajam akal, dan

²Syamsul Kurniawan, *Pendidikan di Mata Soekarno*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, cet. I, 2009), h. 119 – 134.

mengembangkan intelektualitas. Sehingga tidak berlebihan jika Soekarno menyebut bahwa motor hakiki dari semua *rethinking of Islam* adalah kembalinya penghargaan atas akal.

Pendidikan, menurut Soekarno, menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan. Karena pada kenyataannya, pendidikan merupakan faktor penentu bagi perkembangan umat Islam yang diyakini sebagai agama paling sempurna dengan mewajibkan umatnya menempatkan pendidikan sebagai aspek sangat penting. Tidak ada jalan lain untuk memperbaiki keterpurukan umat Islam selain menyusun sistem pendidikan yang berakar pada nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan tujuan-tujuan Islam.

Menurut Soekarno, meskipun agama berasal dari Tuhan dan bersifat *absolute*, namun ia harus dipahami melalui medium penafsiran manusia yang berlaku dalam *setting* lingkungan sosial yang kompleks. Sebagai seorang rasionalis yang selalu mengedepankan akal pikiran sebagai pertimbangan utama dalam setiap argumen-argumen yang dilontarkan, secara prinsipil, Soekarno yakin bahwa untuk memahami Islam seseorang perlu membekali diri pada cakupan pengetahuan yang luas.

Peradaban Islam pernah mengalami kejayaan ketika akal masih menjadi pertimbangan utama dalam setiap aktivitas intelektual dan sistem pendidikannya. Namun, menurut Soekarno, setelah itu, seribu tahun lamanya akal dikungkung. Sejak zamannya kaum Mu'tazilah, sejak zamannya pahlawan-pahlawan akal seperti Al Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Baja, Ibnu Tufail, Ibnu Rusyd, dan lain-lain ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Setelah itu, akal tidak mendapat tempat yang wajar. Akal yang saat itu begitu dominan justru akhirnya dikutuk dan dipinggirkan fungsinya. Setuju atau tidak, Abu Hasan al-Asy'ari sebagai pelopor kehidupan rohaniah, dituduh oleh

Soekarno sebagai yang paling bertanggung jawab atas matinya kekuatan akal. Asy'arisme juga dianggap oleh Soekarno sebagai pokok pangkal munculnya tradisi *taqlidisme* di dalam Islam dan pokok pangkal kependekataan dalam Islam. Islam bukan lagi satu agama yang dapat dipikirkan secara merdeka, melainkan menjadi monopoli kaum fikih dan kaum tarekat. Akibat dominasi kaum Asy'ari, maka dunia Islam menurut Soekarno dilanda kebekuan, sebagaimana air membeku karena hawa dingin di musim *winter*.

2. Refleksi Kebijakan Pemerintah Orde Lama terhadap Pendidikan Islam

Dengan susah payah akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya sendiri, tanpa meminta belas kasihan pemerintah Jepang atau bangsa lain. Kemerdekaan Indonesia melahirkan kehidupan baru di segala bidang, termasuk pendidikan. Setelah Indonesia merdeka, bangsa Indonesia sendiri secepatnya mengubah sistem pendidikan dan menyesuakannya dengan keadaan baru sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Maka, diperlukan sistem pendidikan nasional yang berdasarkan eksistensi masa lampau, masa kini, dan kewaspadaan terhadap perkembangan ke depan.³

Meskipun bangsa Indonesia telah meraih kemerdekaan pada tanggal 17-8-1945 Indonesia merdeka. Tetapi musuh-musuh Indonesia tidak diam saja, bahkan berusaha untuk menjajah kembali. Oleh karena itu, pada bulan oktober 1945 para ulama di Jawa memproklamasikan perang *Jihad fi sabilillah* terhadap Belanda/sekutu. Hal ini berarti memberikan fatwa kepastian hukum terhadap perjuangan umat Islam. Pahlawan perang berarti pahlawan

³ Hanun Asroah. *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos, cet. I, 1999), h. 177.

Jihad yang berkategori sebagai *syuhada* perang. Isi fatwa tersebut adalah sebagai berikut: 1) Kemerdekaan Indonesia wajib dipertahankan. 2) Pemerintah RI adalah satu-satunya yang sah yang wajib dibela dan diselamatkan. 3) Musuh-musuh RI (Belanda/sekutu), pasti akan menjajah kembali bangsa Indonesia. Karena itu kita wajib mengangkat senjata menghadapi mereka. 4) Kewajiban-kewajiban tersebut di atas adalah *fi sabilillah*.

Ditinjau dari segi pendidikan rakyat, maka fatwa ulama tersebut besar sekali artinya. Fatwa tersebut memberikan faedah sebagai berikut: 1) Para ulama santri-santri dapat mempraktikkan ajaran *fi sabilillah* yang sudah dikaji bertahun-tahun dalam pengajian kitab suci fikih di pondok atau madrasah. 2) Pertanggungjawaban mempertahankan kemerdekaan tanah air itu menjadi sempurna terhadap sesama manusia dan terhadap Tuhan yang Maha Esa.⁴

Sebagai modal dan pedoman pertama bagi rakyat dan pemerintah di lapangan pendidikan, dipergunakanlah Rencana Usaha Pendidikan/Pengajaran yang telah dipersiapkan pada hari-hari terakhir penjajahan Jepang. Sebagai langkah awal dikeluarkan "instruksi umum" oleh Menteri PP dan K, yaitu Ki Hajar Dewantara. Sebagai landasan konstitusional, bangsa Indonesia menggunakan UUD 1945 sebagai pedoman dan dasar penyelenggaraan pendidikan nasional.⁵ UUD 1945 Pasal 31 disebutkan, bahwa: (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran; (2) Pemerintah mengusahakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

⁴ <http://www.armhando.com/2012/02/kebijakan-pemerintah-dalam-pendidikan.html>

⁵ Hanun Asroah, *op. cit.*, h. 177.

Dalam kerangka sistem pendidikan nasional, pemerintah memberi penghargaan tinggi bagi pendidikan agama Islam, termasuk lembaga-lembaga pendidikan Islam yang sudah ada. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya berbagai kebijakan pemerintah terhadap eksistensi pendidikan Islam. Pada tanggal 22 Desember 1945 BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) mengumumkan, bahwa: *"Dalam memajukan pendidikan dan pengajaran di langgar-langgar dan madrasah berjalan terus dan diperpesai."* Tidak hanya itu, BPKNIP juga menyarankan agar pendidikan agama di sekolah mendapat tempat yang teratur, seksama, dan mendapat perhatian dan bantuan material dari pemerintah, karena madrasah dan pesantren pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berakar dalam masyarakat Indonesia. Saran tersebut diajukan oleh BPKNIP pada tanggal 27 Desember 1945. Perhatian pemerintah terhadap pendidikan Islam tidak hanya sampai pada peraturan formal, tetapi juga sudah ke aksi. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946. Lembaga ini dipercaya untuk mengurus penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum dan mengurus sekolah-sekolah agama seperti madrasah dan pondok pesantren. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari kesadaran pemerintah akan pentingnya agama sebagai fondasi dalam pembangunan bangsa dan Negara.⁶

Pada waktu Mr. R. Suwandi menjadi Menteri PP dan K (2 Oktober 1946 s.d. 27 Juni 1947), dia membentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara. Panitia ini, pada tanggal 2 Juni 1946, merekomendasikan mengenai sekolah-sekolah agama. Bunyi rekomendasi itu adalah, bahwa: *"Pengajaran*

⁶Ibid., h. 178.

yang bersifat pondok pesantren dan madrasah perlu untuk dipertinggi dan dimodernisasi serta diberikan bantuan biaya dan lain-lain."

Pada bulan Desember 1946 dikeluarkan peraturan bersama dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan mulai kelas IV SR (Sekolah Rakyat = Sekolah Dasar) sampai kelas VI. Pada masa itu keadaan keamanan di Indonesia masih belum mantap sehingga SKB Dua Menteri belum dapat berjalan dengan semestinya. Daerah-daerah di luar Jawa masih banyak yang memberikan pendidikan agama mulai kelas I SR. Pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam pada tahun 1947 yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dari Departemen P dan K, serta Prof. Drs. Abdullah Sigit dari Departemen Agama. Tugasnya ikut mengatur pelaksanaan dan menteri pengajaran agama yang diberikan di sekolah umum.

Tahap demi tahap, sesuai dengan dinamika dan tuntutan pembangunan bangsa, pendidikan Islam semakin terintegrasikan secara total dalam sistem pendidikan nasional. Lahirnya Undang-Undang Pokok Pendidikan dan pengajaran No. 4 tahun 1950 yang menyatakan bahwa: *"belajar di sekolah-sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar,"* sebagai bukti bahwa pendidikan agama (Islam) diakui sebagai komponen dari sistem pendidikan nasional.⁷

Pada tahun 1950 di mana kedaulatan Indonesia telah berlaku untuk seluruh Indonesia, maka rencana pendidikan agama untuk seluruh wilayah Indonesia makin disempurnakan dengan dibentuknya panitia bersama yang

⁷Ibid., h. 178 - 179.

dipimpin Prof. Mahmud Yunus dari Departemen Agama, Mr. Hadi dari Departemen P dan K. Hasil dari panitia itu adalah SKB yang dikeluarkan pada bulan Januari. Isinya ialah: 1) Pendidikan agama yang diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat. 2) Di daerah-daerah yang masyarakat agamanya kuat, maka pendidikan agama diberikan mulai kelas I SR dengan catatan bahwa pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas IV. 3) Di sekolah Lanjutan Pertama dan Tingkat Atas (umum dan kejuruan) diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu. 4) Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua/walinya. 5) Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama, dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama.

Dalam sidang pleno MPRS, pada bulan Desember 1960 diputuskan sebagai berikut: "Melaksanakan Manipol Usdek di bidang mental/agama/kebudayaan dengan syarat spiritual dan material agar setiap warga Negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebangsaan Indonesia serta menolak pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing (Bab II Pasal 2 ayat 1)". Dalam ayat 3 dari pasal tersebut dinyatakan bahwa: "Pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah umum, mulai sekolah rendah (dasar) sampai Universitas," dengan pengertian bahwa murid berhak ikut serta dalam pendidikan agama jika wali/murid dewasa menyatakan keberatannya.

Pada tahun 1966 MPRS bersidang lagi. Dalam keputusannya, bidang pendidikan agama telah mengalami kemajuannya, pendidikan agama menjadi hak wajib dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi Umum Negeri di seluruh Indonesia.

Langkah demi langkah pada akhirnya pendidikan Islam semakin terintegrasi secara total dalam pendidikan nasional. Pentingnya pendidikan agama yang telah terintegralkan dengan pendidikan nasional akhirnya mendapat kekuatan hukum dalam Rumusan Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional yang berbunyi: bahwa pendidikan nasional ialah usaha dasar untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan mengusahakan perkembangan kehidupan beragama, kehidupan yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, nilai budaya, pengetahuan, ketrampilan, daya estetik, dan jasmaninya sehingga ia dapat mengembangkan dirinya bersama-sama dengan sesama manusia membangun masyarakatnya, serta membudayakan alam sekitar. Rumusan pendidikan nasional ini akhirnya dikukuhkan dalam GBHN berdasarkan TAP MPR No. II/1983.⁸

3. Tokoh-Tokoh Pendidikan Masa Orde Lama Yang Peduli dan Memperjuangkan Pendidikan Islam

a. Ki Hajar Dewantara⁹

Ki Hajar Dewantara dilahirkan pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta dan wafat pada tanggal 26 April 1959 dan dimakamkan di Yogyakarta.¹⁰ Nama aslinya, Raden Mas Soewandi Soerjaningrat, putra bangsawan Pakualaman. Sebelumnya ia belajar di *School tot Opleiding van Inlandsche Artsen* (STOVIA) di Jakarta selama 5 tahun, namun tidak menamatkannya dan memutuskan untuk menjadi wartawan. Ia adalah teman baik Dr. Douwes Dekker (Dr. Setiabudhi) dan Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo. Mereka

⁸ *Ibid.*, h. 178.

⁹ MIF. Baihaqi, *Ersiklopedi Tokoh Pendidikan dari Abendanon hingga K.H. Imam Zarkasyi*, (Bandung: Nuansa, cet. I, 2007), h. 44.

¹⁰ Marlon Peranginangin, dkk., *Buku Pintar Pahlawan Nasional*. (Batam Centre: Scientific Press, 2007), h. 111.

bertiga inilah yang mendirikan *Indische Partij*. Karena tulisannya *Als ik eens Nederlander was* (seandainya aku seorang Belanda) di tahun 1913, Ki Hajar Dewantara ditangkap dan dibuang ke Negeri Belanda. Di sini ia belajar untuk menjadi guru di samping memperdalam bidang kewartawanan.

Tidak lama setelah kembali ke Indonesia, Ki Hajar Dewantara menyisihkan waktunya untuk menggeluti dunia pendidikan. Sebagai bukti nyata dari pengabdianya pada tanggal 3 Juli 1922 ia mendirikan Taman Kanak-Kanak yang dinamai "Taman Indrya," permulaan dari Taman Siswa yang disebutnya *National Onderwijs-Instituut Taman Siswa*.

Ki Hajar Dewantara adalah Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pertama pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perjuangannya dalam membuat landasan bagi pendidikan di Indonesia membuat pemerintah RI menjadikan tanggal kelahirannya, 2 Mei, sebagai Hari Pendidikan Nasional.¹¹

Konsep pendidikan yang digagas Ki Hajar Dewantara adalah mengakui hak si anak atas kemerdekaannya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat serta pembawaannya. Karena itu, konsepnya adalah "TUT WURI HANDAYANI" yang berarti mengikuti si anak dari belakang sambil membimbingnya. Si anak aktif dan pendidik berfungsi sebagai orang yang mengarahkan dan melayani. Dasar pendidikannya adalah kebudayaan dan kebangsaan Indonesia.

Kepedulian dan perhatian Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan Islam sangat jelas. Departemen Agama yang dibentuk pada tanggal 3 Januari 1946 adalah berkat kebijakannya ketika ia menjabat sebagai Menteri PP dan K pertama Republik Indonesia. Ketika Mr. R. Suwandi

¹¹*Ibid.*, h. 111.

menjadi Menteri PP dan K (2 Oktober 1946 s.d. 27 Juni 1947), Ki Hajar Dewantara dipercaya untuk memangku jabatan sebagai ketua Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia. Kepanitiaan yang dipimpinnya ini merekomendasikan mengenai sekolah-sekolah agama yang dilaporkannya pada tanggal 2 Juni 1946. Bunyi laporan itu adalah: "Bahwa pengajaran yang bersifat pondok pesantren dan madrasah perlu untuk dipertinggi dan dimodernisasi serta diberikan bantuan biaya dan lain-lain."¹²

b. Mr. R. Soewandi Soerjaningrat

Mr. R. Soewandi adalah tokoh pendidikan dan penggagas EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) dalam Bahasa Indonesia. Pada masa kolonial, Soewandi pernah menjadi Sekretaris *Department van Onderwijs en Eeredienst*. Sesudah Perang Dunia II, ia menjabat Menteri Kehakiman dari November sampai Oktober 1946, kemudian Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP&K) dari 2 Oktober 1946 sampai 27 Juli 1947.¹³

Kepedulian dan perhatian Soewandi terhadap pendidikan Islam adalah terlihat ketika ia dipercayakan duduk sebagai Menteri PP dan K dari tanggal 2 oktober 1946 s.d. 27 Juli 1947. Ia membentuk "Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia" yang diketuai Ki Hajar Dewantara, sebagaimana telah diuraikan di atas.

c. Mr. Raden Ali Sastroamodjojo¹⁴

Mr. Raden Ali Sastroamodjojo adalah tokoh nasional dan pendidik. Ia dilahirkan pada 21 Mei 1903. Ia pernah belajar di Leiden, Belanda. Ia pernah menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dari tanggal 3 Juli s.d. 11 November 1947, kemudian dari tanggal

¹²Hanun Asrohah, *op.cit.*, h. 178.

¹³MIF. Baihaqi, *op.cit.*, h. 129.

¹⁴*Ibid.*, h. 44.

11 November s.d. 4 Juni 1949. Pada tahun 1947 ia berkantor di Yogyakarta, sedang kantor kementerian ada di Surakarta. Sesudah Juni 1949, Kementerian PP dan K pindah ke Yogyakarta. Pada waktu itu, Ali sastroamodjojo memperhatikan para pelajar yang berjuang di garis depan dan membentuk suatu tim pengajar untuk memelihara hubungan dengan para pelajar tersebut.

Dalam bulan Juli 1947, meskipun Ali dan Presiden Soekarno menyingkir ke daerah Madiun karena serbuan Belanda yang mengarah ke ibukota RI, Ali tidak pernah lupa terhadap dunia pendidikan yang berada di bawah wewenangnya. Ia menginstruksikan lewat pemancar radio yang sengaja dipasang kepada para pendidik, baik yang ada di pesantren, di madrasah maupun di sekolah-sekolah umum. Inti instruksinya adalah: "Bagaimana pun keadaannya, pendidikan dan pengajaran harus berjalan terus."

d. K.H. A. Wahid Hasyim¹⁵

Abdul Wahid Hasyim adalah tokoh pendidikan Islam sejati, karena semasa hidupnya tidak pernah lelah memperjuangkan pendidikan Islam. Ia lahir di Jombang pada tahun 1914. Wafat pada tanggal 19 April 1953 di Bandung dalam kecelakaan mobil di Cimahi, Bandung, di makamkan di Tebu Ireng Jombang. Ia dibesarkan di lingkungan pesantren. Ayahnya, K.H. Hasyim Asy'ari, mempunyai sebuah pesantren di Tebu Ireng, Jombang. Di pesantren itu Wahid belajar agama, kemudian di pesantren-pesantren lain. Sesudah itu, ia mengajar di pesantren Tebu Ireng membantu ayahnya. Membaca huruf Latin dan menulis dipelajarinya sendiri. Karena itu, ia dapat membaca buku-buku ilmu pengetahuan, sehingga pengetahuannya bertambah luas.

¹⁵Marlon Peranginangin, *op.cit.*, h. 155.

Ketika Wahid Hasyim menjadi pimpinan, ia mengambil kebijakan yang kontroversial, yaitu memasukkan ilmu pengetahuan umum ke lingkungan pesantren. Di Pesantren Tebu Ireng misalnya, tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan agama, tetapi juga para santri diharuskan belajar huruf Latin dan membaca buku-buku umum lainnya. Kebijakan Wahid itu menimbulkan reaksi dari masyarakat. Tidak hanya dari para orangtua santri yang mengancam akan menarik anak-anak mereka keluar dari pesantren, pemerintah Belanda pun tidak setuju dengan cara-cara yang dilakukan oleh Wahid. Karena menurut mereka, pesantren hanya diizinkan memberikan pelajaran agama. Tetapi, Wahid Hasyim tindak mundur walaupun mendapatkan makian.

Ketika KH. Wahid Hasyim bersama KH. Ilyas mereka mulai memperkenalkan kurikulum dan mata pelajaran umum seperti berhitung dan ilmu bumi di lingkungan Pesantren Tebu Ireng Jombang Jawa Timur itulah terjadi perubahan yang mendasar di lingkungan Pesantren Tebu Ireng. Selain itu, patut pula untuk dicatat langkah perubahan sistem pendidikan Islam juga dilakukan di lingkungan Pesantren *Manbaul Ulum* Surakarta. Selain menyelenggarakan kurikulum ilmu keislaman, pesantren ini juga memperkenalkan kurikulum pengetahuan umum. Sejak itu, pengayaan dan perubahan kurikulum pendidikan di pesantren terus berlangsung sampai sekarang dengan mengupayakan keseimbangan antara kurikulum bidang agama dengan kurikulum umum. Langkah tersebut dilakukan untuk menjembatani perbedaan kemampuan dan penguasaan ilmu antara lulusan pesantren dan lulusan sekolah umum.¹⁶

¹⁶Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pascakemerdekaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 33.

Karena kepedulian dan perhatiannya yang besar dengan dunia pendidikan, terutama pendidikan Islam, pada tahun 1925 Wahid Hasyim yang adalah orangtua Gusti Abdurrahman Wahid, mantan Presiden ketiga RI di era Reformasi ini, mendirikan madrasah modern yang diberi nama "Nidhomiah." Di situ anak didik diajari cara berpidato dan berorganisasi. Mereka diharuskan membaca buku, surat kabar, dan majalah yang memuat pengetahuan umum. Untuk melatih mereka berorganisasi, didirikannya IPPI (Ikatan Pelajar-Peajaran Islam).

Pada masa awal pemerintahan RI, Wahid Hasyim diangkat sebagai Menteri Negara dalam Kabinet Presidensial. Sesudah berhenti, ia banyak mencurahkan perhatian untuk membangun kembali NU. Sesudah pengakuan kedaulatan, tiga kali ia diangkat menjadi Menteri Agama, yakni dalam Kabinet RIS (1949-1950), Kabinet Natsir (1950-1951), dan Kabinet Sukiman (1951-1952).

Semenjak Wahid Hasyim menjabat sebagai Menteri Agama pendirian madrasah di pesantren-pesantren semakin menemukan momentumnya. Ia melakukan pembaruan pendidikan agama Islam melalui peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1950, yang menginstruksikan pemberian pelajaran umum di madrasah dan memberi pelajaran agama di sekolah umum negeri dan swasta. Persaingan dengan madrasah modern dan sekolah-sekolah umum, mendorong pesantren-pesantren mengadopsi madrasah ke dalam pesantren.¹⁷

e. K.H. Imam Zarkasyi¹⁸

K.H. Imam Zarkasyi adalah perintis dan pimpinan Pesantren Modern Gontor. Ia lahir pada 21 Maret 1910 di Gontor, Mlarak, 12 km. tenggara Ponorogo. Ia anak terakhir

¹⁷Hanun Asrohah, *op.cit.*, h. 189.

¹⁸MIF. Baihaqi, *op.cit.*, h. 147.

dari tujuh bersaudara dan memiliki hubungan langsung dengan Sultan Kesepuhan Cirebon. Bapaknya, Raden Santoso Anom Baseri, adalah keturunan keenam Kesepuhan Cirebon. Sementara ibunya, Rr. Sudarmi, adalah keturunan Surodiningrat, Bupati Madiun.

Pasangan R. Santoso dan Rr. Sudarmi dikaruniai 7 anak dan tiga di antaranya dikenal sebagai TRIMURTI yang merintis Pesantren Gontor, yaitu Kj. R.H. Ahmad Sahal, Kj. R.H. Zainuddin Fannanie, dan Kj. R.H. Zarkasyi. Dari silsilahnya dapat dikatakan bahwa Imam Zarkasyi berasal dari keturunan ningrat atau priyayi.

Imam Zarkasyi menempuh pendidikan *Hollandsch Inlandsche School* (HIS) Ongko Loro (setingkat SD) di Jetis Ponorogo (1923-1927) sambil santri di Pondok Josari dan Pondok Darul Hikam, Jaresan, Ponorogo. Zarkasyi pernah nyantri di Pondok Jamsaren, Solo. Ketika di Solo juga ia belajar di Madrasah Manba'ul Ulum yang terdiri dari sebelas jenjang kelas I hingga XI, bersistem klasikal. Ia pernah studi di Normal Islam Padang, sebuah sekolah yang dipimpin oleh Mahmud Yunus ketika itu. Di sini ia belajar metode dan filsafat pendidikan.

Tahun 1947 Imam Zarkasyi aktif di P.P. Hizbullah dan pada tahun itu juga duduk di bagian Pendidikan dan Kementerian Agama di Yogyakarta. Tetapi, ia tidak betah karena Kementerian Agama terlalu mementingkan pengetahuan umum daripada pengetahuan agama.

Tahun 1956 ia duduk di Dewan Perancang Nasional (Deppenas) sebagai wakil umat Islam yang menangani Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun 1974 turut membidani lahirnya Surat Keterangan Bersama tentang "Pendidikan umum di madrasah sesuai dengan standar pengetahuan umum di sekolah umum setingkat."

Imam Zarkasyi sangat konsisten memperjuangkan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang merupakan

kombinasi dari sistem pendidikan Barat dan pendidikan Timur Tengah. Beliau bersama dua saudaranya, menghidupkan kembali pondok pesantren ayahnya - Kiai R. Santoso Anombesazri – yang sudah lama vakum.

Dalam perjalanannya, Gontor kemudian dikenal oleh masyarakat sebagai pondok pesantren modern dan kini berkibar terus sampai memiliki delapan cabang di Indonesia.

C. Simpulan

Eksistensi pendidikan Islam adalah factor sejarah yang telah ada sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Pada masa Orde Lama berkuasa, pendidikan islam mendapatkan prioritas utama untuk dilaksanakan. Kebijakan itu bukan tanpa alasan. Penguasa Orde Lama sangat berkepentingan terhadap tokoh-tokoh Islam untuk mempertahankan kemerdekaan. Ada beberapa kebijakan pendidikan yang terlahir pada masa pemerintahan Orde Lama, yaitu: 1) Pemerintah Orde Lama memberikan peluang yang seluas-luasnya terhadap Pendidikan Islam untuk tumbuh dan berkembang di berbagai segi kehidupan. 2) Lahimya Rencana Usaha Pendidikan/Pengajaran sebagai modal dan pedoman di lapangan pendidikan. 3) Indonesia menggunakan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. 4) Pemerintah memberikan penghargaan bagi pendidikan agama Islam. 5) Dibentuknya Departemen Agama pada tanggal 3 januari 1946. Lembaga ini dipercaya untuk mengurus penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum dan mengurus sekolah agama. 6) Pada bulan Desember 1946 dikeluarkan peraturan bersama dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan mulai kelas IV SR sampai kelas VI. 6) Pada tahun 1947 pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan

Pengajaran Agama Islam. tugasnya mengatur pelaksanaan dan materi pengajaran agama yang diberikan di sekolah umum.

Dari berbagai kebijakan itu, tahap demi tahap, sesuai dengan dinamika dan tuntutan pembangunan bangsa, pendidikan Islam semakin terintegrasikan secara totalitas ke dalam sistem pendidikan nasional.